

## Memperkuat Jerat bagi Teroris

Pemerintah perlu berhati-hati dalam memperkuat aturan hukum untuk menjerat teroris. Keinginan yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Intelijen dan RUU Pemberantasan Terorisme ini bisa menimbulkan masalah baru. Jangan sampai perubahan aturan yang diusulkan justru mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Keinginan pemerintah itu kemarin diungkapkan lagi oleh Ansyad Mbai. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mengatakan hukum Indonesia terlalu lembek untuk menangkul terorisme dibanding beberapa negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Menurut dia, inilah yang membuat negara kita menjadi surga persembunyian teroris.

Itu sebabnya, berkali-kali Ansyad mengusulkan memperpanjang masa penahanan bagi orang yang dicurigai sebagai teroris. Sesuai dengan UU Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Terorisme, penahanan sementara tanpa mensyaratkan bukti yang cukup bisa dilakukan selama tujuh hari. Menurut dia, aturan ini tidaklah cukup karena kondisi geografis negara kita. Maksudnya, sering kali masa penahanan ini habis dipakai untuk membawa orang yang ditangkap ke tempat pemeriksaan.

Dalam RUU Intelijen yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, aturan yang dianggap mempermudah penanganan terorisme juga muncul. Pemerintah memang tak lagi berkukuh mengusulkan wewenang intelijen menangkap teroris. Tapi Kepala Badan Intelijen Negara Sutanto tetap berharap pihaknya bisa melakukan interogasi terhadap teroris yang ditangkap oleh penegak hukum. Pemerintah juga masih mengusulkan agar intelijen diperbolehkan menyadap tanpa harus melalui izin pengadilan.

Publik mesti mencermati semua perubahan aturan yang diusulkan pemerintah. Harus diakui beberapa negara lain memiliki aturan yang lebih keras terhadap teroris. Tapi sungguh gegabah jika kita menjiplaknya begitu saja tanpa mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya negara kita sendiri.

Dengan aturan yang ada sekarang pun Detasemen Khusus Antiteror sering dikritik karena menangkap orang secara serampangan. Anggota detasemen ini juga dinilai kerap menembak orang hingga mati tanpa bisa membuktikan bahwa mereka dalam posisi yang berbahaya. Ekseks yang lebih besar akan terjadi jika aturan untuk menjerat teroris diperkeras lagi. Apalagi jika intelijen dan anggota TNI dilibatkan pula dalam pemberantasan terorisme.

Berbagai aksi teror yang berkembang belakangan ini juga bukan alasan yang cukup meyakinkan untuk memperkuat aturan memerangi teroris. Dalam kasus bom buku, misalnya, khalayak justru bingung karena pejabat buru-buru menuduh pelakunya adalah pemin lama. Sampai sekarang petinggi kita masih berpendapat sama sekalipun belum ada tersangka yang ditangkap. Sebagian masyarakat justru mendapat kesan aparat tidak serius menangani kasus ini.

Harus diakui tidak semua usul pemerintah itu buruk. Misalnya, menyangkut sanksi bagi pelatihan yang berbau militer oleh kelompok masyarakat, hal yang mestinya memang diatur. Tapi publik tetap harus melihat potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam usul lain yang disodorkan pemerintah dengan alasan memerangi terorisme. •

## KUTIPAN

**“Perkara hadir atau tidak biar diputuskan sendiri, yang penting panitia sudah punya iktikad baik.”**

Ketua Panitia Lokal Kongres Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia di Surabaya, **Saleh Ismail Mukadar**, kemarin, yang menyatakan akan tetap mengundang Ketua Umum PSSI Nurdin Halid yang selama ini berseteru dengan mereka.

**“Ketua DPR (Marzuki Alie) melakukan kebohongan publik dengan mengatakan pembangunan gedung baru ini warisan DPR periode lalu.”**

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009, **Alvin Lie**, kemarin di Jakarta, yang membantah pernyataan DPR periode lalu merekomendasikan pembangunan gedung baru.

# Polisi Blokir 30 Rekening Malinda

Duit dari tiga rekening yang diusut untuk beli mobil mewah.

**JAKARTA** — Markas Besar Kepolisian RI memblokir puluhan rekening yang diduga dipakai mantan Relationship Manager Citigold Inong Malinda Dee untuk menilap duit nasabah. “Kami sudah blokir 30 rekening dari beberapa bank yang belum bisa kami sebutkan nilai nominalnya,” kata Direktur Ekonomi Khusus Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Arief Sulistyono kemarin.

Salah satu yang diblokir adalah rekening dengan nilai sekitar Rp 11 miliar. Polisi masih perlu mengkaji sebelum memastikan aliran dana itu milik korban Malinda. Koordinasi pun masih dilakukan polisi dengan Citibank serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mendapatkan hasil audit internal bank itu, serta transaksi keuangan Malinda, termasuk aliran da-

na ke luar negeri.

Semula polisi memperkirakan duit nasabah yang diduga ditilap Malinda bernilai Rp 17 miliar, lalu berkembang menjadi sekitar Rp 20 miliar. Duit ini dihitung berdasarkan aliran dana dari 30 rekening nasabah yang diblokir itu. Sumber *Tempo* menyebutkan, dari ratusan korbannya, Malinda diduga menilap dana sekitar Rp 90 miliar.

Malinda ditengarai telah mengalihkan dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik. Ia menggunakan slip penarikan kosong, yang sudah diteken pemilik rekening, atau diduga dibubuhi tanda tangan palsu. Duit itu lalu dimasukkan, di antaranya, ke rekening pribadi dan perusahaan yang diindikasikan fiktif. Ia ditangkap 23 Maret lalu. Polisi menyita empat mobil: Hummer, dua Ferrari, dan Mercedes-Benz, milik Malinda.

Menurut Arief, keempat mobil dan apartemen Malinda diperoleh dengan cara *leasing* memakai uang muka dari duit nasabah itu. Dari penelusuran sementara, polisi menemukan aliran dana Rp 16,1 miliar dari rekening nasabah pelapor pertama. Nama nasabah tak disebutkan dengan alasan kerahasiaan bank.

Transaksi berlangsung pada 6 Januari-23 Desember 2010. Duit yang mengalir berdasarkan bukti 29 formulir transfer itu diduga dipakai untuk membeli mobil Mercedes-Benz tipe 350 keluaran 2010, Ferrari F430 Scuderia atas nama Malinda Dee, dan Ferrari Camporia atas nama MAL.

Pada rekening korban, kedua transaksi terjadi antara 13 Agustus 2009 dan 30 Desember 2010. Nilai nominal yang ditarik Rp 4,7 miliar dan US\$ 10.100. Kemudian

transaksi di rekening nasabah ketiga dilakukan pada 9 Juni 2010 sebesar Rp 311,2 juta. Duit terakhir dipakai untuk uang muka pembelian mobil Hummer keluaran 2010 atas nama Abi.

Soal penggunaan dana tersebut, pengacara Malinda, Halapancas Simanjutak, menyatakan duit kliennya berasal dari penghasilan sebagai pegawai bank. Karyawan yang sudah 22 tahun bekerja itu kini bergaji Rp 70 juta dengan bonus Rp 250 juta per tiga bulan. “Klien saya merupakan pegawai berprestasi yang membawahkan tiga kantor cabang,” katanya.

Polisi kemarin hendak merekonstruksi dugaan penggelapan dana nasabah ini di Citibank Tower. Namun agenda ini gagal dilakukan. “(Malinda) sedikit flu,” ujarnya. • FEBRIANA FIRDAUS | RIKY FERDIANTO | DWI RIVANTO AGUSTIAR | SUTJI DEGIYA

## FIFA Anggap Pengurus PSSI Tidak Kredibel

**NYON** — FIFA akhirnya mengambil langkah tegas terkait dengan kekiruhan di tubuh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Komite Darurat FIFA memutuskan pada 1 April lalu, sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Statuta FIFA, telah dibentuk Komite Normalisasi yang akan mengambil alih Komite Eksekutif PSSI saat ini.

Keputusan FIFA ini dimuat dalam situs resmi badan sepak bola dunia itu kemarin malam. Komite Darurat FIFA memperkirakan kepemimpinan PSSI saat ini tidak bisa mengontrol sepak bola di Indonesia. Hal itu di-

buktikan dengan kegagalan PSSI mengontrol Liga Primer Indonesia (LPI), yang tetap berjalan tanpa keterlibatan PSSI. Badan sepak bola tertinggi di Indonesia itu juga dinilai gagal menyiapkan kongres yang mengadopsi *electoral code* dan memilih Komite Pemilihan.

Hal itu membuat Komite Darurat FIFA menyimpulkan bahwa kepemimpinan PSSI telah kehilangan kredibilitas di Indonesia. “PSSI dinilai tidak lagi dalam posisi untuk memimpin proses mengatasi krisis saat ini,” tulis FIFA.

Disebutkan juga bahwa Komite Normalisasi memi-

liki tiga misi. Pertama, menyelenggarakan pemilihan berdasarkan *electoral code* FIFA dan Statuta PSSI sebelum 21 Mei 2011. Kedua, membawa liga yang berada di luar PSSI (LPI) ke bawah kendali PSSI atau dihentikan secepat mungkin. Ketiga, menjalankan tugas harian PSSI dalam semangat rekonsiliasi demi kebaikan sepak bola Indonesia.

Komite Normalisasi terdiri atas insan sepak bola Indonesia yang tidak akan dapat menjalankan salah satu posisi di PSSI dan akan bertindak sebagai Komite Pemilihan.

FIFA juga menyinggung so-

al empat bakal calon Ketua Umum PSSI yang sempat mengajukan diri tapi ditolak Komite Banding pada 28 Februari lalu. Keempatnya adalah Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, George Toisutta, dan Arifin Panigoro. Mereka, menurut FIFA, tidak bisa lagi masuk sebagai calon Ketua Umum PSSI.

Sejumlah pengurus teras PSSI yang dihubungi *Tempo* tak memberi jawaban. Hanya Direktur Badan Liga Indonesia Andi Darussalam Tabusalla yang mengirim pesan pendek menanggapi keputusan FIFA itu. “(Itu) keputusan yang bijak,” tulisnya. • FIFA.COM | RAJU FEBRIAN | RINA WIDIASTUTI

## Keluarga Korban Penagih Utang Tuntut Citibank

**JAKARTA** — Keluarga Irzen Octa, korban pembunuhan oleh penagih utang, menuntut Citibank membiayai pendidikan kedua putri almarhum sampai tamat kuliah. “Kami akan tulis surat ke Citibank meminta pertanggungjawaban dan memenuhi hak korban,” kata kuasa hukum keluarga Irzen, Ficky Fisher dari Kantor Pengacara OC Kaligis, kemarin.

Tuntutan itu diajukan, kata Ficky, karena dengan meninggalnya Irzen, praktis tak ada lagi yang membiayai kedua anaknya, Citra, 14 tahun, dan Grace, 15 tahun. “Irzen adalah tulang punggung keluarga,” katanya.

Adapun istri Irzen, Esi Ronaldi, adalah ibu rumah tangga.

Irzen tewas setelah dianiaya tiga penagih utang dari agensi Citibank di kantor bank itu, di Menara Jamsos-tek, Jakarta Selatan, pada 29 Maret lalu. Ia datang untuk mengkonfirmasi tagihan kartu kreditnya yang membengkak menjadi Rp 100 juta dari sebelumnya Rp 48 juta. Polisi telah menetapkan empat tersangka berinisial B (belum tertangkap), A, D, dan H.

Hasil otopsi oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo tertanggal 29 Maret menyimpulkan Irzen tewas akibat pecahnya pembuluh darah di

bilik otak dan di bawah selaput kertas otak sehingga menekan batang otak. Dokter spesialis forensik Ade Firmansyah menyebutkan adanya kekerasan di tubuh korban.

Pihak Citibank sebelumnya menyangkal tuduhan ketiga tersangka penganiaya hingga tewas tersebut adalah karyawannya. Alasannya, mereka dipasok dari agensi. Juru bicara Ditta Amarthorseya tidak dapat dihubungi untuk dimintai konfirmasi. Pesan pendek pun tak berbalas.

Ficky mengatakan Citibank tak bisa lepas tangan. “Sebab, peristiwa itu terjadi di kantor mereka,” katanya.

Menurut dia, enam penagih utang datang pada malam sebelum peristiwa tewasnya Sekretaris Jenderal Partai Pemersatu Bangsa itu.

Kakak ipar Irzen Octa, Suryadarma, mengatakan pihak keluarga hanya meminta keadilan. Berdasarkan pengamatan *Tempo*, rumah bertingkat dua bercat putih yang ditinggali Irzen Octa terlihat kumuh. Plafon rusak dan bocor. “Sudah jarang pulang, sejak meninggal ditinggal begitu saja rumahnya,” kata Sulaiman, tetangga di Perumahan Budi Indah, Batucapeur, Kota Tangerang.

• DWI RIVANTO | AYU CIPTA | PINGIT | SUTJI